

Memproteksi Peserta Didik dari Bahaya Hoaks Dengan Literasi Kritis

Ahmad Syamsul Bahri^{a, 1*}

^a Sekolah Menengah Pertama Swasta Anugerah Insani, Indonesia

¹ syamsul310584@gmail.com *

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 5 November 2022;

Revised: 25 November 2022;

Accepted: 2 Desember 2022.

Kata-kata kunci:

Hoaks;

Literasi Kritis;

Peserta Didik;

Proteksi.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan upaya proteksi bagi peserta didik agar tidak terjebak dalam bahaya hoaks. Upaya tersebut dilakukan dengan pemberdayaan kepada peserta didik melalui literasi kritis. Literasi kritis tersebut didasarkan pada sudut pandang teori falsifikasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Penelitian ini berdasarkan kajian literatur terdahulu serta berupaya mengkaji mengenai analisis pemikiran Karl Popper terutama tentang teori falsifikasi. Hasil penelitian menemukan bahwa literasi kritis dilakukan dengan membaca berita, buku, dan beragam teks di media sosial. Pembacaan tersebut bukan dilakukan dengan membaca cepat, tetapi mencermati secara mendetail terutama pesan dan maksud dari berita tersebut disajikan. Bila peserta didik tidak dapat mendeteksi berita bohong, maka terjadi kerapuhan berpikir dan bisa menyebabkan terjadinya mis-komunikasi. Untuk itu, latihan-latihan membaca dalam konteks literasi kritis perlu diajarkan oleh para pendidik atau guru agar peserta didik mampu memfilter informasi yang dengan memahami teori falsifikasi. Rekomendasi penelitian, semua elemen di sekolah perlu juga mempelajari literasi kritis.

Keywords:

Hoax;

Protection;

Learners;

Critical Literacy.

ABSTRACT

Protecting Learners from the Dangers of Hoaxes With Critical Literacy.

The purpose of this study is to outline protection efforts for learners so as not to get caught in the danger of hoaxes. These efforts are carried out by empowering learners through critical literacy. Such critical literacy is based on the point of view of falsification theory. This research uses qualitative methods with a literature research approach. This research is based on previous literature studies and seeks to examine the analysis of Karl Popper's thoughts, especially on the theory of falsification. The results found that critical literacy was done by reading news, books, and various texts on social media. The reading is not done by reading quickly, but looking at the details, especially the message and intent of the news presented. If learners cannot detect fake news, then there is a fragility of thinking and can cause mis-communication. For this reason, reading exercises in the context of critical literacy need to be taught by educators or teachers so that learners are able to filter that information by understanding falsification theory. Research recommendations, all elements in schools need to also study critical literacy.

Copyright © 2022 (Ahmad Syamsul Bahri). All Right Reserved

How to Cite : Bahri, A. S. (2022). Memproteksi Peserta Didik dari Bahaya Hoaks Dengan Literasi Kritis. *Lentera : Jurnal Kajian Bidang Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(2), 39–44. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/lentera/article/view/435>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Ilmu pengetahuan terus menerus berkembang seiring dengan berjalannya waktu (Widiyono, 2019). Pengetahuan menjadi salah satu aspek paling utama untuk keberlangsungan hidup umat manusia, karena dengan adanya pengetahuan terciptalah berbagai macam hal mutakhir yang saat ini kita gunakan sehari-harinya. Perkembangan ilmu pengetahuan saat ini tidak luput turut mengiringi perkembangan teknologi yang semakin lama semakin *spectacular*. Segala sesuatu kini bisa dilakukan dengan beberapa sentuhan jari saja pada layar *smartphone*, tablet, atau pada *keyboard* laptop masing-masing individu. Dengan kemajuan yang begitu pesat ini hal-hal yang rasanya tidak mungkin, bisa menjadi sesuatu yang mungkin terjadi. Manusia bisa membeli barang apa pun yang kita inginkan meskipun barang tersebut hanya ada di luar negeri, bukan hal yang sulit, ada aplikasi belanja *online* sekarang. Begitu mudahnya kita dalam mengakses segala sesuatu melalui teknologi termutakhir saat ini tentunya sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari semua umat manusia. Namun, tidak menutup kemungkinan pula bahwa kemudahan akan akses suatu hal ini bisa berbuah pahit bagi kita (Subiakto, 2015).

Peserta didik bisa mengakses apa pun di media *online* termasuk berita-berita terkini yang sedang terjadi di dunia. Sebagai manusia, kita harus mengupayakan untuk selalu *up to date* mengenai isu-isu penting negara entah itu berfungsi untuk instansi tempat kita mengabdikan atau untuk diri kita sendiri. Akan tetapi, tidak semua manusia memiliki gaya normal dalam menulis, mengolah, atau menyebarkan berita. Ada yang langsung menelan mentah-mentah informasi baru yang mereka dapatkan, ada yang menerima informasi dengan cukup baik tetapi mengurangi fakta atau bahkan melebih-lebihkan rumor dalam informasi tersebut ketika menyebarkannya. Tentunya hal ini jika diteruskan akan berdampak buruk bagi diri kita sendiri juga bagi orang lain. Bagi insan manusia yang tergolong dalam *agent of change* seperti peserta didik, berita-berita yang kredibilitasnya perlu dipertanyakan itu tentunya tidak dapat kita yakini lagi (Megawanti, 2015).

Peserta didik sebagai “penggerak” dalam perubahan di tanah air tercinta kita ini, sudah semestinya mengkritisi setiap informasi baik itu dari sumber tidak dikenali maupun dari sumber yang paling tepercaya. Sumber tidak dikenali tidak selalu berisikan informasi dengan konten tidak jelas, mungkin alasan sumber itu tidak dikenali adalah untuk menjaga anonimitas pemilik informasi tapi bukan berarti informasi tersebut bisa dengan mudah kita percaya juga. Tetapi, pada kenyataannya, masih banyak peserta didik yang pada beberapa kesempatan masih memercayai berita bohong alias *hoax*. Hal ini bisa saja sangat meresahkan, mengingat peran peserta didik begitu penting untuk kemajuan sebuah bangsa. Maka dari itu, kita harus mulai mencari solusi akan permasalahan ini demi kepentingan bersama.

Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan salah satu tokoh filsuf ternama dunia, yakni Karl Popper. Karl Popper atau yang memiliki nama lengkap Karl Raymund Popper lahir pada tanggal 28 Juli 1902 di Wina, Austria. Ia mengajar di Universitas Christchurch di mana kampus tersebut juga merupakan tempatnya berhasil menerbitkan buku yang berjudul *Open Society and Its Enemies* dan *The Poverty of Historicism*. Kemudian, ia pindah ke Inggris untuk mengajar di salah satu universitas di London, London School of Economics (Komarudin, 2014). Meskipun ia mengajar di sekolah yang fokusnya di bidang ekonomi, ia membuktikan bahwa pola pikir mendalam akan suatu hal tidak kalah penting dalam membangun sebuah pengetahuan baru. Di kampus LSE tersebut dia semakin mengepakkan sayapnya dalam bidang perkembangan ilmu pengetahuan. Popper memiliki teori dasar pemikiran yang dapat disangkutpautkan dengan maraknya berita *hoax* yang selalu beredar di kalangan masyarakat, namun dalam penelitian ini akan dikhususkan pada kalangan peserta didik.

Mengenai teori tersebut akan dibahas sedikit lebih mendetail tetapi bukan di bagian pendahuluan ini, melainkan di bagian pembahasan. Kita akan melakukan *cross-check* dan membandingkan teori yang didirikan oleh Popper dengan kenyataan saat ini mengenai isu berita palsu yang meresahkan di tengah lingkungan pendidikan. Rumusan masalah yang ingin penulis angkat dalam karya ini adalah bagaimanakah situasi berita *hoax* di dunia dan di Indonesia? Lalu, apa relasi antara hoaks yang beredar

saat ini dengan teori falsifikasi milik Popper? Dengan adanya pembahasan ini diharapkan pembaca bisa mengambil kesimpulan lalu mengilhami suatu hal yang positif dari karya tulis yang penulis tulis ini.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data deskriptif (Arikunto, 2010). Penelitian ini berdasarkan kajian literatur terdahulu serta berupaya mengkaji mengenai analisis pemikiran Karl Popper terutama tentang teori falsifikasi. Analisis penelitian ini menggunakan pembacaan deskriptif terhadap fenomena hoaks, lalu menggunakan sudut pandang Karl Popper. Pembacaan deskriptif menggunakan rujukan dari buku, dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal yang ada baik secara online maupun yang ada secara cetak.

Hasil dan Pembahasan

Sebenarnya, *hoax* sedari zaman dahulu hanya saja, istilah bekennya baru diketahui di abad belasan menuju duapuluhan. *Hoax* atau dalam penulisan bahasa Indonesia-nya *hoaks* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah informasi bohong. Menurut *Cambridge Dictionary*, hoaks adalah sebuah rencana atau trik yang bertujuan untuk menipu seseorang atau suatu pihak. Menurut *Oxford Dictionary* juga tak jauh berbeda, yaitu hoaks adalah suatu tindakan yang mana memiliki maksud untuk menipu orang banyak, dan tujuan atau makna dari hoaks ini tentunya untuk sesuatu yang tidak menyenangkan.

Media sosial saat ini memanglah sangat bermanfaat bagi kita untuk mencari informasi terbaru dari belahan dunia mana saja dan informasi tentang apa saja. Tentu dari media sosial tersebut juga kita bisa menambah relasi pertemanan dengan orang-orang yang sebelumnya tidak kita ketahui atau kita kenali, namun suatu waktu kita bisa *meet up* dengan orang-orang tersebut, itu semua berawal dari media sosial yang kian hari kian *booming*. Namun, memang sudah sifat duniawi bahwa segala sesuatu selalu ada plus- minusnya. Media sosial yang kalau menurut kalimat sebelumnya terlihat seperti sangat- sangat positif bagi kehidupan manusia, pada kenyataannya bisa menjadi bumerang bagi diri kita sendiri, bahkan bagi orang lain. Bagaimana bisa begitu? Jadi begini, media sosial tidak melulu isinya atau fasilitasnya hanya bercengkrama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Ada media sosial (*platform* mana saja) yang menjadi target dari suatu *brand* yang mengangkat isu-isu berita terkini, mereka membuat akun resmi (*official account* yang telah terverifikasi atau centang biru) untuk menarik perhatian massa dan menjual produk mereka. Ada pula 'akun bodongan' yang mengatasnamakan *brand* resmi dengan menyebarkan berita-berita palsu yang entah tujuan sebenarnya untuk apa.

Kehadiran akun bodongan atau akun palsu yang menyebarkan berita palsu alias hoaks itu tadi tentunya dapat memicu terjadinya keresahan berlebihan pada seluruh lapisan masyarakat, mengingat media sosial sekarang ini termasuk aspek terutama, substansial, dan tak bisa ditinggalkan oleh masyarakat. Meskipun begitu, penulis akui bahwa untuk memilah berita dari sumber mana yang dapat dipercaya dan konten sebenarnya suatu berita itu seperti apa memanglah sukar untuk dilakukan. Entah itu karena penyedia hoaks yang terlalu lihai menipu para korbannya, atau memang kebanyakan orang kurang mengetahui trik-trik untuk membedakan mana berita palsu mana berita yang valid.

Di luar negeri, umumnya hoaks digunakan sebagai pengalihan isu atas suatu fenomena yang sedang terjadi, seperti misalnya hal-hal yang berkaitan dengan aktivis- aktivis di bidang apa pun itu, yang mungkin condongnya memang lebih ke arah politik. Seperti yang dituliskan oleh Kim dan Rim (2020) dalam artikelnya, para aktivis bidang apa saja itu akan menggunakan media sosial untuk menyebarkan suatu kabar yang mana kabar tersebut belum tentu benar namun aktivis tersebut berupaya semaksimal mungkin agar kabar yang mereka sebarkan dipercaya oleh banyak masyarakat. Alasan mengapa disebarinya kabar tersebut adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menarik perhatian dan simpati dari masyarakat yang menjadi target sasaran kabar palsu yang mereka buat.

Tidak melulu soal politik, isu hoaks juga dapat mengiringi isu-isu lainnya seperti diskriminasi dan disinformasi yang bahkan mengancam berjalannya sebuah ketatanegaraan. Negara-negara di Eropa menyadari bahwasanya perkembangan teknologi dan mudahnya berpendapat dalam media sosial juga dapat menjadi ancaman bagi sebuah rezim suatu bangsa. Oleh karena itu, sudah banyak negara yang berada di Uni Eropa sana membuat kebijakan yang mana mengatur tentang berita-berita yang tersebar di media sosial, agar rakyat negara tersebut tidak mendapatkan berita palsu atau hanya ‘mengonsumsi’ informasi yang valid-valid saja. Contohnya, Jerman yang memiliki sanksi untuk perusahaan media sosial, misalnya ada sebuah perusahaan media sosial yang gagal mengurangi/menghapus *hoax* akan dikenakan denda sebesar \$53 juta (Rp755 miliar). Juga Filipina dengan sanksi untuk *content creator* yang menyebarkan hoaks, apabila karya dari para kreator konten mengandung kebohongan atau hoaks maka mereka akan dihukum penjara minimal 1-5 tahun dan denda maksimal lebih dari satu miliar rupiah. Sedangkan Kanada tidak membuat peraturan pemerintahan yang paten seperti negara lainnya, yang mereka lakukan untuk memberantas hoaks adalah dengan diterapkannya pelajaran hoaks itu sendiri dalam kurikulum pendidikan, yang tujuannya agar semua masyarakat utamanya generasi muda-mudi, sedari dini sudah bisa terhindar dari hoaks yang sedang beredar.

Hoaks di Indonesia pun tidak jauh berbeda kondisinya dari tempat-tempat yang sebelumnya telah penulis sebutkan. Dengan teknologi yang sebenarnya cukup terbelakang, Indonesia tetap cukup banyak mengetahui tentang isu-isu yang ramai diperbincangkan di media sosial. Hoaks-hoaks yang beredar di media sosial kalangan masyarakat Indonesia biasanya juga hadir sebagai perwakilan perspektif sebagian orang saat berpendapat mengenai dunia politik. Pengalihan isu, menarik simpatisan, menjatuhkan lawan, itu semua sering beredar di media sosial Indonesia. *Platform* yang paling sering menjadi tempat ‘ricuh’-nya hoaks dunia politik ini biasanya Twitter, Instagram, dan Facebook. Dengan adanya oknum *buzzer* yang menjadi penyebar isu di *platform* media sosial mana saja, hoaks seolah-olah seperti penyakit yang tidak memiliki obat. Sukar sekali dihentikan, sekalinya diberi klarifikasi, klarifikasi tersebut justru yang dipertanyakan keabsahannya.

Netizen Indonesia menjadi terlalu unik. Masyarakat Indonesia yang menurut Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran, Deddy Mulyana, suka sekali berkumpul dan bercerita dari A hingga Z, namun dalam cerita atau obrolan tersebut, sumber pembicara tidak mengetahui mana data yang valid dan mana data yang diragukan kebenarannya. Sehingga dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia dengan budaya tersebut justru semakin memudahkan *hoax* untuk menyebar tanpa dapat dihentikan dengan mudah (Pakpahan, 2017). Selain isu-isu politik, terdapat isu lainnya yang ‘mewarnai’ dunia kebohongan berita di Indonesia, antara lain isu mengenai SARA, kesehatan, ekonomi/keuangan, berita duka, iptek, bahkan bencana alam juga tak luput menjadi topik utama dari beberapa pembuat konten hoaks (Rahmawati, 2018).

Hoaks semakin marak di media sosial Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat negeri tercinta kita ini masih kurang melek dengan informasi yang valid, terlalu suka menelan mentah-mentah berita yang didapatkan. Kecepatan merupakan poin utama melupakan keakuratan dan keabsahan sebuah informasi (Iqbal, 2019). Penyebaran hoaks ini turut melibatkan peserta didik dan mahasiswi di dalamnya, yang mana hal ini tentu sangat disayangkan karena peserta didik sebagai kaum terpelajar harusnya sudah bisa mengolah data atau berita yang diterima dengan benar lalu menyampaikan atau menyebarkan berita tersebut dengan pertimbangan yang bijaksana.

Dari data yang telah diolah oleh Zuria dan Suyanto (2018) menunjukkan bahwa peserta didik Unesa sudah cukup baik untuk mengenali dan berita hoaks, namun tidak dapat dipungkiri masih ada beberapa peserta didik yang tidak dapat mengidentifikasi kevalidan berita dengan baik. peserta didik yang kurang bisa mengidentifikasi valid tidaknya berita ini memang belum tentu menjadi penyebar berita hoaks, tapi kemungkinan itu selalu ada. Beberapa kali penulis temui di aplikasi media sosial Twitter juga ada sejumlah akun yang membuat beberapa *tweet* dan ketika penulis lihat lebih dalam profil akunnya, ternyata mereka masih peserta didik. Kenyataan tersebut mengecewakan bagi penulis

pribadi, karena menurut penulis kalau memang peserta didik tersebut belum mengetahui kebenaran berita yang dia sebar, lebih baik diam daripada memperkeruh suasana, karena kehadiran hoaks dapat mengancam persatuan dan kesatuan dari tanah air tercinta kita ini.

Teori yang sangat unik milik Karl Popper ini lebih menekankan pada kebenaran sebuah fakta yang mana kebenaran tersebut haruslah mutlak tanpa ada cacat. Popper beranggapan bahwa benar tidaknya sebuah ilmu atau teori harus melalui proses pengujian ulang dengan berbagai aspek yang dapat menyalahkan teori tersebut, apabila ditemukan tanpa ada kesalahan, maka teori tersebut baru bisa dikatakan teori yang kokoh dan dapat digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan (Harahap, dkk, 2019). Jadi, falsifikasi adalah satu konsep besar dan upaya Popper dalam membuktikan kekokohan dari suatu teori pengetahuan.

Adanya banyak percobaan atau pertanyaan sistematis untuk menyalahkan sebuah teori, di situlah kekokohan (kebenaran) sebuah teori dapat diuji. Apabila teori tersebut berhasil menjawab percobaan atau pertanyaan tadi, maka teori tersebut dapat dianggap lolos uji kelayakan adanya sebuah teori. Alasan mengapa Popper mengembangkan teorinya yang satu ini adalah Popper merasa bahwa sebuah teori tidak selalu bertahan selamanya, adakala sebuah teori saat ini akan digantikan dengan teori mutakhir di masa mendatang. Maka dari itulah, dibuat falsifikasi sebagai pengujian untuk menentukan seberapa lama sebuah teori akan bertahan dalam dunia pengetahuan (Assya'bani, 2020).

Menurut penulis, teori ini tepat sekali dalam perannya sebagai pengujian dari teori-teori pengetahuan yang lain. Teori falsifikasi mengajak para pelajar untuk memastikan teori yang diyakininya terlebih dahulu dengan justru mempertanyakan teori tersebut, pertanyaan itu memang ditujukan sebagai sumber keraguan keabsahan teori yang sedang diuji, namun jika hasilnya memuaskan atau teori itu dapat menjawab pertanyaannya, maka teori tersebut dapat dikatakan valid, dapat bertahan lama, dan dapat dipercaya. Akan tetapi, penulis merasa teori ini sangat berguna memang, tapi kehadiran falsifikasi sebagai pengujian juga penulis rasa dapat terlalu merusuh, dan bukannya menenangkan keadaan malah membuat keadaan dapat menjadi lebih rumit.

Peserta didik menyikapi hoaks berdasarkan Falsifikasi Popper. Sekarang kita telah memahami inti dari teori falsifikasi milik Popper. Dari teori tersebut peserta didik di mana pun mereka berada bisa mengambil pelajaran dan menjadikan teori tersebut sebagai indikator pada saat menerima sebuah informasi atau berita baru. Misalnya, kita peserta didik mendapatkan kabar atau *hot news* terbaru, yang pertama kali harus kita lakukan bukan menyebarkannya ke teman-teman kita, namun menanyakan kabar alias *hot news* tadi benar atau tidak. Menanyakan juga usahakan kepada sumber yang tepercaya, seperti kalau kabar tersebut mengenai administrasi kampus, maka kita tanyakan langsung ke pihak administrasi kampus kita.

Proses kita bertanya-tanya dan membuktikan kebenaran dari sebuah berita tersebut dapat diasumsikan bahwa kita sedang menerapkan teori falsifikasi milik Popper dalam kehidupan sehari-hari. Berita atau kabar tersebut dianggap sebagai sebuah teori pengetahuan yang akan diuji oleh falsifikasi, dan pertanyaan yang kita miliki dianggap sebagai bahan atau variabel uji coba dalam pembuktian sebuah berita. Harusnya, kalau semua peserta didik (utamanya di Indonesia) melakukan atau menerapkan sistem falsifikasi dalam kehidupan sehari-hari, maka hoaks bisa saja diberantas di dunia perkuliahan. Tidak hanya di perkuliahan, penulis rasa semua peserta didik bisa menerapkan falsifikasi di lingkungan sekitarnya seperti keluarga, pertemanan, dan lain-lain, dengan begitu persentase menyebarnya hoaks akan ikut menurun di lingkungan masyarakat.

Simpulan

Proses penyebaran berita atau informasi terbaru, seringkali tak bisa dikendalikan. Simpulan dari penelitian ini yaitu bahwa literasi kritis dilakukan dengan membaca berita, buku, dan beragam teks di media sosial. Pembacaan tersebut bukan dilakukan dengan membaca cepat, tetapi mencermati secara mendetail terutama pesan dan maksud dari berita tersebut disajikan. Peserta didik dapat mendeteksi

berita bohong dengan melatih kemampuan berpikir dan mengantisipasi terjadinya mis-komunikasi. Latihan-latihan membaca dalam konteks literasi kritis perlu diajarkan oleh para pendidik atau guru agar peserta didik mampu memfilter informasi yang dengan memahami teori falsifikasi. Entah kebenaran berita tersebut berganti atau memang berita di lingkungan sekitar itulah yang memilih keluar dari jalur validasi. Penyimpangan fakta dalam penyebaran sebuah berita tersebut dapat dipastikan berdampak buruk untuk satu atau bahkan semua pihak. Saran penelitian, semua elemen di sekolah perlu juga mempelajari literasi kritis.

Referensi

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta
- Assya'bani, R. (2020). Methodology of Scientific Reseach Programmes Imre Lakatos: Implikasi Terhadap Studi dan Pendidikan Islam. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 218-231.
dictionary.cambridge.org Diakses pada tanggal 7 Juni 2021 kbr.id Diakses pada tanggal 7 Juni 2021
- Fatimatus Zuria, S. (2018). Kajian keterampilan intelektual mahasiswa UNESA dalam mengenali berita hoax di media sosial. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 6(2).
- Harahap, R., Hasibuan, A. T., Sirait, S., Yuliawati, F., & Lubis, N. (2019). Teori Falsifikasi Karl Raimund Popper dan Kontribusinya Dalam Pembelajaran IPA Bagi Siswa Usia Dasar. *MAGISTRA: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar dan Keislaman*, 10(2), 166-185.
- Iqbal, M. (2019). Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia. *Literasi Hukum*, 3(2), 1-9.
- Komarudin, K. (2016). Falsifikasi Karl Popper Dan Kemungkinan Penerapannya Dalam Keilmuan Islam. *At-Taqaddum*, 6(2), 444-465.
- Megawanti, P. (2015). Meretas permasalahan pendidikan di Indonesia. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 2(3).
- Muthaharah, S. (2020). *Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Hoax Dalam Pasal 45 A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Menurut Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
- Pakpahan, R. (2017). Analisis Fenomena Hoax Diberbagai Media Sosial Dan Cara Menanggulangi Hoax. *Konferensi Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi*, 1(1).
- Parvin, P. (2010). *Karl Popper*. Bloomsbury Publishing USA.
politik.lipi.go.id Diakses pada tanggal 4 Juni 2021 web.kominfo.go.id Diakses pada tanggal 8 Juni 2021
- Rahmawati, A. (2018). *Tingkat Literasi Media Mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta Mengenai Informasi Hoax tentang Kebijakan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Berdasarkan Individual Competences Framework* (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Subiakto, H. (2015). *Komunikasi politik, media, dan demokrasi*. Prenada Media.
- Widiyono, S. (2019). Pengembangan nasionalisme generasi muda di Era Globalisasi. *Jurnal Populika*, 7(1), 12-21.